

DAFTAR PUSTAKA

1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan. Jakarta: Kemenkes RI; 2017.
2. Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Jakarta; 2014.
3. Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Jakarta; 2014.
4. Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Jakarta; 2020.
5. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional Nonkesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Jakarta: Kemenkes RI; 2016.
6. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Standar Kompetensi : Kamus Kompetensi Teknik [Internet]. Sistem Informasi Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan Republik Indonesia (Sibangjangkri). 2021 [cited 12 Jan 2023]. Available from: <https://sibangjangkri.kemkes.go.id/m/6/standar-kompetensi>
7. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional. Jakarta: Kemenpan & RB RI; 2023.
8. Dinkes Kab.50 Kota. Pelaksanaan Uji Kompetensi Pada Perawat : Telah Selesai Dilaksanakan [Internet]. Website Dinkes Kab.50 Kota. 2020 [cited 13 Jan 2023]. Available from: <https://dinkes.limapuluhkotakab.go.id/Welcome/lihatBerita/QUZFL0NOMGxpajlwOU1paWMzc3h5dz09>
9. Kemenkes RI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. Jakarta: Kemenkes RI; 2013.
10. Sibangjangkri. Progress Capaian Indikator Jumlah SDM Kesehatan yang Tersertifikasi Kompetensi Bulan April 2021. Jakarta: Pusat Pengembangan Mutu SDM; 2021.
11. Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan. Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan. Jakarta: Kemenkes RI; 2021.
12. Dinkes Kabupaten Lima Puluh Kota. Dokumen Perencanaan dan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Payakumbuh: Dinkes Kab. 50 Kota; 2022.
13. Dinkes Kab.50 Kota. Dokumen Proposal Perencanaan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan. Payakumbuh: Dinkes Kab.50 Kota; 2022.
14. Agustino L. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta; 2017.
15. Kadji Y. Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik : Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas. Gorontalo: UNG Press; 2015.

16. Raja EL. Analisis Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021. Universitas Indonesia; 2022.
17. Tunsiah S. Implementasi Kebijakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Widyaiswara di Era Pandemi. *Jurnal Analisis Kebijakan*. 2021;5(2):132–48.
18. Rusnadiyah, Sumadinata WS, Sari DS. Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung. *Journal Responsive [Internet]*. 2021;4(2):105–23. Available from: <http://jurnal.unpad.ac.id/responsive/article/view/34735>
19. Mius A, Suradinata E, Ilham M, Djaenuri HMA. Implementasi Kebijakan Seleksi Terbuka Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. *Jurnal Kebijakan Pemerintah*. 2019;2(1):49–73.
20. Handana F. Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Dokumen Rekam Medis Pasien Rawat Inap Pasien RSUD dr.Chasbullah Abdul Majid Kota Bekasi Tahun 2021 [Skripsi]. Tasikmalaya: Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi; 2021.
21. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Kemenpan & RB; 2019.
22. Taufiqurokhman. Kebijakan Publik : Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. Jakarta: FISIP Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama (Pers); 2014.
23. Mustari N. Pemahaman Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: LeutikaPrio; 2015.
24. Purwanto EA, Sulistyastuti DR. Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media; 2015.
25. Subarsono. Analisis Kebijakan Publik (Konsep Teori, dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Belajar; 2011.
26. Winarno B. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: Buku Kita; 2012.
27. Widodo J. Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing; 2009.
28. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Jakarta: Kemendagri RI; 2017.
29. Pemerintah Kabupaten Kudus. Profil Dinas Kesehatan [Internet]. 2017 [cited 14 Feb 2023]. Available from: https://kuduskab.go.id/p/175/dinas_kesehatan
30. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jakarta: Kemenkes RI; 2016.
31. Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta; 2010.
32. Sidiq U, Choiri MM. Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. Ponorogo: Nata Karya; 2019.
33. Krisanti Jasaputra D, Santosa S. Metodologi Penelitian Biomedis : Edisi 2. Bandung: Danamartha Sejahtera Utama Grafika; 2008.
34. Afrizal. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers; 2014.
35. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Balitbangkes. Panduan Penelitian

- dan Pelaporan Penelitian Kualitatif. Jakarta: Lembaga Penerbit Balitbangkes; 2018.
36. Hardani, Andriani H, Dkk. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu; 2020.
 37. Abdussamad Z. Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: Syakir Media Press; 2021.
 38. Afifuddin Saebani AB. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia; 2009.
 39. Dinkes Kab.50 Kota. Profil Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022. Payakumbuh: Dinkes Kab. 50 Kota; 2022.
 40. Silalahi U. Komunikasi Pemerintahan: Mengirim dan Menerima Informasi Tugas dan Informasi Publik. *Jurnal Administrasi Publik*. 2004;3(1).
 41. Nursalim. Implementasi Kebijakan Tentang Pemungutan Retribusi Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Cikatomas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017. *Jurnal Unigal*. 2017;117–26.
 42. Laary Y, Tulus FMG, Dengo S. Implementasi Kebijakan Keamanan dan Ketertiban di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Administrasi Publik*. 2022;VIII(120):60–7.
 43. Nugroho R. *Public Policy*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo; 2008.
 44. Sabrina LE. Analisis Implementasi Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru Di Bidang Transportasi Angkutan Umum Kota Bukittinggi [Skripsi]. Padang: FKM Universitas Andalas; 2022.
 45. Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law. Jakarta; 2023.
 46. Ningsih DS. Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Makanan Dan Minuman Di Kabupaten Sijunjung Tahun 2019 [Skripsi]. Padang: FKM Universitas Andalas; 2019.
 47. Taufiqurokhman. Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan. Jakarta: FISIP Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama; 2008.
 48. Muninjaya.A.A.Gde. Manajemen Kesehatan : Edisi 2. Bandung: EGC; 2004.
 49. Yunita J. Proses Perencanaan Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Kesehatan Komunitas*. 2012;1(4):210–5.
 50. Subekti A. Analisis Faktor-Faktor Kendala di dalam Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di UPT Puskesmas Palengaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 2020;1–18.
 51. Rahmadhani, Oktamianiza, Yulia Y, Aisyah N yulisma. Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Pendaftaran Online (E-Health) pada Rumah Sakit. *Indonesian Journal of Health Information Management*. 2022;2(3).
 52. Ariani1 NLPR, Susanto AD, Karsana IWW. Analisis Efektifitas Sistem Pendaftaran Online Pasien Rawat Jalan Berbasis Web Pada UPTD Puskesmas Kerambitan II Kabupaten Tabanan. *Journal Health Care Media*. 2022;6(2):81–5.
 53. Sukarna. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Mandar Maju; 2011.
 54. Hasibuan R. Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan Masyarakat. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management; 2021.
 55. Purnama. Evaluasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pada Dinas Kesehatan di Kabupaten Bulungan. Universitas Terbuka Jakarta; 2015.

56. Melati, Revida E, Sinambela M. Hubungan Monitoring dan Evaluasi dengan Kualitas Pelayanan di Puskesmas Sei Suka-Batubara. *Jurnal Inovasi Kesehatan Masyarakat*. 2019;1(1).
57. Kemenkes RI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. Jakarta: Kemenkes RI; 2019.

